



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMAM MARGONO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM**
3. NHK : **66764**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.782.497.650**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/170 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 594.056.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 422 m2/100 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 113.516.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/119 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 732.000.000
4. Tanah Seluas 114 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 61.218.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/245 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
6. Tanah Seluas 6385 m2 di TUBAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 45.652.750
7. Tanah Seluas 1184 m2 di TUBAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 8.465.600
8. Tanah Seluas 4444 m2 di TUBAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 31.774.600
9. Tanah Seluas 2658 m2 di TUBAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 19.004.700
10. Tanah Seluas 800 m2 di TUBAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.720.000
11. Tanah Seluas 7109 m2 di TUBAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 71.090.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	547.000.000
1. MOBIL, FORTUNER MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	
300.000.000		
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	
17.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	
230.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	161.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	200.250.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.690.747.650
III. HUTANG	Rp.	1.514.209.861
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.176.537.789

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.